

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2010, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolarboratif, Gadjah Mada University Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 1986, Manajemen Edisi 2, BFE, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lukman, Sampara 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA LAN Press, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2014, Hukum Administrasi Negara II, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, SF, dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1992, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2018, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta.
- Said, Rousdy, 1996, Kajian Terhadap Beberapa Aspek Pengawasan, Forum Komunikasi Pasca Sarjana Pemda Kalimantan Barat, Pontianak.



- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedirjo, Prayudi Atmo, 2002, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutopo, Ariesto Hadi, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Syahrizal, Darda, 2013, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1979, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

## **B. Artikel Jurnal**

- Chairunisa Israjuningtias, Agri, *Force Majeure (Overmacht)* dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.
- Priyono, Ery Agus, Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No. 1, November 2017

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Azhari, Muhammad Bayu, 2018, *Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rubiyanto, 2018, *Perancangan Arsitektur Secure System Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan di Tingkat Kabupaten dengan Pendekatan Business Program Management (BPM) (Studi Kasus: Kabupaten Wonosobo)*, Tesis, Magister Teknik Elektro Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



#### D. Artikel dalam Antologi dengan Editor

Koentjoro, Diana Halim, “Arti Cara dan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Optik HAN” dalam SF. Marbun dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Risnain, Muhammad, “Problematika Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam Heryandi, 2014, *Dimensi Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

#### E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2005 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.



Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 57)

Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 39).

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/VII/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

#### **F. Internet**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, "Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan 21 OPD", <https://dukcapil.slemankab.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerjasama-dengan-21-opd.slm/2>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

Yovita, "Indonesia Sudah Memiliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi", [https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media), diakses pada 2 Juli 2019.

Yuda, Hendri Sasmita, "Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, diakses pada 2 Juli 2019.